

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada awal bulan September 2015, pemerintah menerbitkan paket kebijakan ekonomi untuk mendorong perekonomian nasional. Kebijakan tersebut ditujukan kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ditujukan untuk sektor UMKM karena sektor ini memiliki potensi dan efektifitas yang tinggi untuk menyerap tenaga kerja di Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 pasal 1 (satu) tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau sering disebut UMKM memiliki pengertian yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sektor UMKM berperan dalam meningkatkan perekonomian nasional khususnya di bidang Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan. Menurut data dari Kantor Staf Presiden (KSP), UMKM mampu menyerap 99,9 persen tenaga kerja di Indonesia. Sedangkan secara ekonomi kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia

sebesar 59 persen. Untuk itu peningkatan sektor UMKM sangat penting dan strategis (ksp.go.id, 2015).

Kebijakan untuk sektor UMKM berupa pemberian subsidi bunga dalam pembiayaan (kredit) yang salah satunya dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.05/2016, Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebenarnya sudah ada sejak tahun 2007 melalui Instruksi Presiden No.6 Tahun 2007 namun bunga KUR yang diterapkan masih relatif tinggi. Sehingga pada bulan September 2015, pemerintah melalui KUR menerbitkan kebijakan subsidi bunga yang diperuntukkan untuk sektor UMKM.

Subsidi bunga yang diberikan oleh pemerintah memungkinkan para pelaku UMKM memperoleh kredit bunga rendah. Bunga yang diterapkan pada KUR di bank saat ini rata-rata sekitar di bawah 10% pertahun. Pemberian subsidi bunga tersebut dikarenakan tekad pemerintah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan daya saing di pasar internasional melalui peningkatan permodalan UMKM.

Pertumbuhan UMKM yang sangat pesat dan sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional membuat pemerintah memberikan perhatian lebih pada sektor UMKM. Bank Indonesia (BI) mencatat baru 22

persen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang menikmati akses pembiayaan perbankan (depkop.go.id, 2016). Sehingga pemberian subsidi bunga pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) diharapkan dapat meningkatkan pelaku UMKM untuk memiliki akses perbankan dan program pembangunan pemerintah. Paket kebijakan pemerintah ini sangat relevan ditujukan untuk pemberdayaan sektor UMKM yang memiliki kualitas namun menghadapi kendala dalam permodalan.

Meskipun UMKM yang menggunakan perbankan masih sedikit, namun menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 58,78 triliun per 31 Juli 2016. Jumlah itu mencapai 53,82 persen dari target Rp 109,21 triliun. Aslan Lubis selaku Deputy Direktur Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis OJK mengatakan bahwa “jenis kredit yang jumlah realisasinya paling besar adalah KUR mikro, yakni mencapai Rp 39,61 triliun atau 56,65 persen dari target” (Jatmiko, 2016).

**Tabel 1.1 Realisasi Penyalur KUR terbesar di Inonesia**

No.	Bank	Target	Realisasi	Prosentase
1.	BRI	71,58 triliun rupiah	43,92 triliun rupiah	61,36 persen
2.	Mandiri	13 triliun rupiah	7,42 triliun rupiah	57,05 persen
3.	BNI	11,5 triliun rupiah	7,23 triliun rupiah	63,35 persen

Sumber : Jatmiko, 2016

Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang paling besar adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Pada kuartal I

tahun 2016 penyaluran KUR sebesar Rp 50,8 triliun. Adapun target penyaluran KUR BRI tahun 2016 mencapai Rp 67,5 triliun. Pencapaian tersebut terdiri atas KUR Ritel sebesar Rp 39,5 triliun dengan debitur sebanyak 2.666.488 pelaku UMKM. Adapun untuk realisasi KUR Mikro sebesar Rp 11,3 triliun dengan debitur 54.571 pelaku UMKM (bisniskeuangan.kompas.com, 2016).

Realisasi terhadap KUR di BRI yang tinggi tersebut dikarenakan bunga yang diterapkan pada KUR sangat rendah yaitu 9 persen pertahun atau setara dengan 0,41 persen flat pertahun. Saat pengajuan pinjaman KUR di BRI, nasabah tidak dipungut biaya provisi dan administrasi (bri.co.id, 2016).

Pertumbuhan pengguna layanan KUR di bank konvensional khususnya BRI yang semakin meningkat tentu menjadi ancaman bagi perkembangan lembaga keuangan mikro syariah yang turut membantu permasalahan permodalan bagi para pelaku UMKM seperti *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT). *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan syariah bukan bank yang bergerak dalam skala mikro yang memiliki kesetaraan dengan koperasi simpan pinjam (KSP) yang memiliki fungsi sebagai lembaga pengumpul dan penyalur dana ke masyarakat. Kegiatan operasional BMT dalam menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat tidak menggunakan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil. Sehingga masyarakat yang menginginkan

pinjaman tanpa adanya bunga dapat melakukan pembiayaan di BMT atau lembaga keuangan mikro lainnya yang disetarakan seperti Koperasi Syariah.

Ancaman terhadap perkembangan lembaga ini berdasarkan pada pertumbuhan BMT yang masih lambat. Pertumbuhan BMT secara nasional pada bulan Maret 2015 telah mencapai aset sebesar Rp 4,7 triliun dan jumlah pembiayaan sebesar Rp 3,6 triliun. Sedangkan pada bulan Oktober 2015 berhasil mengonsolidasi 561 BMT berbadan hukum koperasi memiliki dengan total aset Rp 11,9 triliun dan memiliki anggota 2.694.013 orang yang tersebar di seluruh Indonesia (republika.co.id, 2015).

Pertumbuhan BMT yang masih lambat jika dibandingkan dengan bank konvensional tentu menjadi masalah. Masalah tersebut di antaranya sifat BMT yang merupakan lembaga berbadan hukum koperasi membuat setiap kegiatan dalam menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat terbatas tidak sebebaskan lembaga yang berbadan hukum bank. Masalah lainnya yaitu dikarenakan standar layanan bank konvensional yang lebih profesional, kebutuhan masyarakat yang lebih beragam dan bank konvensional mampu memberikan inovasi produk yang beragam daripada bank syariah, serta harga yang diberikan BMT belum mampu menyaingi Bank Konvensional. Ketiga faktor tersebut akan mempengaruhi keputusan masyarakat untuk memilih melakukan pinjaman di bank konvensional atau pembiayaan di BMT.

Respon masyarakat yang begitu positif terhadap penerapan program KUR dibandingkan dengan pembiayaan yang ada di Lembaga Keuangan

Syariah membuat peneliti berfikir untuk menambah sebuah variabel yang akan mempengaruhi masyarakat untuk memiliki respon yang positif terhadap pembiayaan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah. Variabel tersebut berupa sikap. Indikator sikap dalam penelitian ini yaitu kognitif (pengetahuan), affective (emosional), dan tingkah laku.

Ketiga indikator dalam sikap ini memungkinkan masyarakat memberikan tanggapan yang positif atau negatif terhadap pembiayaan yang ada di BMT. Sikap masyarakat yang positif diharapkan mampu mendorong masyarakat pengguna KUR di BRI untuk pindah (*switching*) ke BMT. Dalam penelitian ini ditegaskan bahwa sikap lebih tepat sebagai variabel *moderating* dari pada variabel *intervening* yang akan memperkuat atau melemahkan keputusan masyarakat untuk pindah melakukan pembiayaan di LKS dari pinjaman KUR di BRI.

Responden dari penelitian ini adalah pedagang pasar Sleman yang menggunakan KUR di BRI. Pasar Sleman dipilih sebagai tempat penelitian karena di sekitar pasar Sleman terdapat Kantor Cabang BRI sebagai lembaga penyalur KUR terbesar di Indonesia dan juga KSPPS Prima Artha sebagai penyalur dana pembiayaan masyarakat untuk sektor mikro. Sehingga para pedagang pasar Sleman ini memiliki akses yang terbuka untuk melakukan pinjaman di lembaga keuangan yang berbasis syariah maupun konvensional.

Melalui uraian di atas, peneliti ingin mengetahui seberapa besar **Pengaruh Penerapan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI**

## **Terhadap Keputusan Masyarakat Melakukan Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah dengan Sikap sebagai Variabel Moderating.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Apakah penerapan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI dan sikap berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap keputusan masyarakat melakukan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah?
2. Sejauh manakah sikap sebagai variabel *moderating* mempengaruhi masyarakat untuk melakukan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah khususnya BMT?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI dan sikap berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap keputusan masyarakat melakukan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah.
2. Untuk mengetahui sejauh mana sikap sebagai variabel *moderating* mempengaruhi masyarakat untuk melakukan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, antara lain:

1. Kegunaan secara teoritis

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dari segi teori yang diperoleh di kampus maupun praktik dan juga kontribusi terhadap ilmu pengetahuan yang terbaru.

b. Bagi pembaca

Dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau literatur maupun perbandingan untuk penelitian-penelitian yang lain atau selanjutnya.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi serta referensi untuk pengembangan maupun inovasi produk di Lembaga Keuangan Syariah.

b. Bagi masyarakat

Dapat dijadikan referensi bagi masyarakat untuk bisa membedakan antara Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ada di Bank Konvensional pada umumnya dan di BRI pada khususnya dengan pembiayaan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti KSPPS Prima Artha.

## **E. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti merumuskan beberapa hipotesis, yaitu:

1. Diduga penerapan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI dan sikap berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap keputusan masyarakat melakukan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah.
2. Diduga sikap sebagai variabel *moderating* mempengaruhi masyarakat yang melakukan KUR di BRI untuk berpindah dan melakukan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, hipotesis penelitian dan sistematika pembahasan

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

Tinjauan pustaka dan kerangka teori berisi uraian mengenai tinjauan pustaka terdahulu dan teori yang relevan dengan penelitian ini yaitu teori pemasaran, Kredit Usaha Rakyat (KUR), sikap, pengambilan keputusan, *brand switching* (perpindahan produk/merek), dan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Metode penelitian berisi uraian mengenai jenis penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik serta analisis data.

**BAB 1V : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dan pembahasan berisi uraian mengenai hasil penelitian (deskripsi dan analisis data), uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis data, pengujian hipotesis, hasil wawancara dengan responden, serta pembahasan.

**BAB V : PENUTUP**

Penutup berisi uraian mengenai kesimpulan dan saran.